

Received: 15-08-2026 | Accepted: 15-09-2026 | Published: 1-10-2026

**SISTEM EKONOMI SOSIALIS DAN EKONOMI ISLAM: KONSEP,
SEJARAH, KARAKTERISTIK, DAN PERBEDAANNYA**

**Kiki Rahmawati¹, Athiyyah Farah Fauzizah², Nasifa Azra Kamila³, Najwa
Rana Azzahra⁴, Fellin Mulia Ramadhani⁵, Nur Halima Isstatul Umi⁶, Taufiq
Kurniawan⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya

Email Koresponden: 26081194009@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi kapitalis yang berfokus pada keuntungan sering kali memicu ketimpangan sosial, sehingga sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang berkeadilan. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, sejarah, karakteristik, serta perbedaan utama antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Metode penyusunan yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapitalisme menekankan pada hak milik pribadi, persaingan bebas, dan mekanisme pasar dengan keterlibatan pemerintah yang sangat minim. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, kejujuran, serta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual yang bersumber dari ajaran agama. Penulisan ini menyimpulkan bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada aturan etika; kapitalisme memberikan kebebasan individu tanpa batas untuk mengumpulkan harta, sedangkan ekonomi Islam mengatur aktivitas ekonomi dengan nilai moral demi kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: *Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Islam, Sejarah Ekonomi, Karakteristik Ekonomi, Perbandingan Sistem Ekonomi.*

ABSTRACT

The capitalist economic system, which focuses on profit, often triggers social inequality, making the Islamic economic system an equitable alternative. This paper aims to explain the concepts, history, characteristics, and main differences between the capitalist economic system and Islamic economics. The writing method used is a literature review by analyzing various relevant references. The study results show that capitalism emphasizes private property rights, free competition, and market mechanisms with minimal government involvement. Conversely, Islamic economics emphasizes the principles of justice, honesty, and a balance between worldly and spiritual needs derived from religious teachings. This writing concludes that the most fundamental difference lies in ethical rules; capitalism provides unlimited individual freedom to accumulate wealth, whereas Islamic economics regulates economic activities with moral values for the common welfare

Keywords: *Capitalist Economic System, Islamic Economics, Economic History, Economic Characteristics, Comparative Economic System.*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi memegang peranan krusial dalam kehidupan bermasyarakat sebab mengatur bagaimana sumber daya dikelola, bagaimana produksi dan distribusi dijalankan, serta bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam penerapannya, tiap sistem ekonomi mempunyai landasan pemikiran, kebijakan, struktur kepemilikan, dan mekanisme pengelolaan sumber daya yang tidak sama. Perbedaan itu bisa berpengaruh terhadap pembagian peran antara individu, masyarakat, dan negara dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, pemahaman atas suatu sistem ekonomi tidak hanya ditinjau dari tujuannya, melainkan juga dari cara sistem tersebut diterapkan dalam kenyataan.

Sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam mempunyai prinsip serta ciri yang berbeda. Sistem ekonomi sosialis lebih menekankan pengelolaan sumber daya secara bersama oleh masyarakat, dengan peran pemerintah yang dominan, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab sosial, serta berbagai kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara biasanya berperan besar dalam mengatur produksi, menyalurkan hasil produksi, dan menjamin pemerataan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tetap memberi ruang bagi kepemilikan individu, namun kepemilikan itu dibatasi oleh prinsip keadilan, larangan eksploitasi, larangan riba, serta kewajiban sosial seperti zakat dan penyaluran kekayaan kepada yang membutuhkan.

Perbedaan tersebut dapat diamati dari konsep kepemilikan, peran pemerintah, cara menyalurkan kekayaan, serta tujuan yang hendak dicapai. Dari sisi kepemilikan, sistem sosialis cenderung menekankan kepemilikan bersama atau kontrol negara atas sumber daya penting, sedangkan ekonomi Islam mengakui hak milik individu dan kelompok dengan tetap menegaskan bahwa kepemilikan harus diperoleh secara halal dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Dari sisi peran pemerintah, sistem sosialis menempatkan pemerintah sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam memberi peran kepada pemerintah sebagai pengawas dan penjamin keadilan agar aktivitas ekonomi tidak menyalahi prinsip syariah. Dari sisi distribusi kekayaan, ekonomi sosialis mengutamakan pemerataan melalui kebijakan negara,

sementara ekonomi Islam memakai mekanisme zakat, infak, sedekah, wakaf, dan larangan penimbunan kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. (Abrori, 2026)

Penelitian sebelumnya memakai metode penelitian kepustakaan untuk mengkaji transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa sistem sosialis menekankan pemerataan dan kepemilikan bersama, sedangkan ekonomi Islam memadukan berbagai aktivitas ekonomi dengan prinsip keadilan, etika, dan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, kajian atas kedua sistem tersebut tidak hanya berhenti pada perbedaan ideologi, tetapi juga perlu meninjau bagaimana masing-masing sistem menjawab persoalan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan pembagian sumber daya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih terarah pada kedua sistem tersebut agar dapat memperjelas konsep, sejarah perkembangannya, ciri-cirinya, serta perbedaan antara sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam.

Kajian ini diharapkan dapat membantu memahami cara setiap sistem mengatur kepemilikan, pengelolaan sumber daya, penyebaran kekayaan, serta pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tersebut penting karena keberhasilan suatu sistem ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh seberapa jauh sistem itu mampu mewujudkan keadilan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perbandingan antara sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam dapat memberi gambaran mengenai kelebihan serta tantangan dari masing-masing sistem ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Merujuk pada uraian di atas, maksud dari penulisan ini ialah untuk mengkaji konsep, sejarah, karakteristik, dan perbedaan antara sistem ekonomi sosialis dengan ekonomi Islam, agar mampu menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang landasan pemikiran serta cara penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. (Riyadi and Hilyatin, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis dipakai untuk memaparkan, mengkaji, dan menafsirkan data kepustakaan secara sistematis sesuai dengan konteks dan isi sumber-sumber yang dipakai. Sumber data yang dipakai berupa

artikel jurnal ilmiah dan buku yang relevan, dengan prioritas pada publikasi sepuluh tahun terakhir supaya analisis yang dihasilkan tetap mutakhir dan relevan. Sementara itu, pemilihan sumber kepustakaan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian tema penelitian, kredibilitas penerbit, serta keterkaitan isi publikasi dengan permasalahan yang diteliti.

Metode ini menghasilkan pemahaman yang lebih tepat melalui penelusuran makna dan konteks, bukan dengan pengukuran statistik. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak dianalisis melalui perhitungan angka, tetapi melalui proses membaca, mencatat, mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan gagasan-gagasan penting dari berbagai literatur. Peneliti berperan sebagai alat utama dalam penelitian, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, ketelitian peneliti dalam memahami isi sumber, memilih informasi yang relevan, serta menarik kesimpulan secara objektif merupakan faktor utama dalam penelitian ini.

Prinsip-prinsip dasar ini diterapkan secara konsisten dalam penelitian ini, sehingga tidak perlu diuraikan secara rinci. Satu-satunya hal yang perlu diingat adalah bahwa prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan subjek penelitian, yakni studi pustaka historis komparatif, bukan studi lapangan seperti wawancara atau observasi partisipatif. Pendekatan historis dipakai untuk menelusuri perkembangan konsep, kebijakan, atau peristiwa yang relevan dalam rentang waktu tertentu, sedangkan pendekatan komparatif dipakai untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara berbagai sumber, teori, atau konteks yang dikaji.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan tertulis yang telah dipublikasikan, bukan data primer di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk studi kepustakaan. Data sekunder tersebut diperoleh melalui artikel jurnal, buku, dokumen ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini hanya membaca literatur, menafsirkan, dan membandingkan ide-ide baru; kita tidak melakukan eksperimen atau melakukan intervensi apa pun terhadap subjek penelitian kita. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif yang didukung oleh analisis terhadap sumber-sumber kepustakaan yang digunakan. (Nopnop and Usman, 2025)

HASL DAN PEMBAHASAN

Konsep Sistem Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang melibatkan campur tangan pemerintah, tetapi memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap sistem perekonomian ini, segala hal di dalam sistem perekonomian ini diatur dan dikomandokan oleh pemerintah. Sistem ekonomi sosialisme memiliki tujuan kemakmuran bersama. Tujuan kemakmuran bersama dalam sistem ekonomi sosialis berarti bahwa kepentingan dan kesejahteraan bersama lebih utama dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam sistem ini, sumber daya dan alat produksi yang dianggap penting diatur penuh oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah mengatur pengelolaan produksi, distribusi, penggunaan barang dan jasa seperti air, listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu, pemerataan ekonomi merupakan salah satu tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat dan memastikan hasil sumber daya dapat dirasakan secara merata. (Juliyanto, n.d.)

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya memiliki prinsip yang dapat diterapkan secara luas, termasuk oleh pihak yang memilih untuk mengikuti ketentuan dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu karakteristiknya adalah penerapan konsep berbagi risiko dalam kegiatan ekonomi, yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktiknya, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui mekanisme bagi hasil. Selain itu, uang dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai alat pertukaran dan bukan sebagai komoditas untuk memperoleh keuntungan semata. Aktivitas ekonomi juga harus terhindar dari riba dan gharar serta dilaksanakan secara transparan dan jujur. Oleh karena itu, berbagai transaksi ekonomi, termasuk kegiatan di pasar modal, harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan syariah dan menghindari praktik yang mengandung ketidakjelasan maupun unsur kecurangan. (Sagaf et al., 2024)

Islam mengadvokasi suatu sistem yang memberikan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga, termasuk dengan mengatur distribusi kekayaan dan menciptakan mekanisme yang mempromosikan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Konsep ekonomi kerakyatan ini terlihat dalam praktik-praktik seperti zakat, yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mendukung kelompok fakir dan miskin. Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kesejahteraan manusia serta keseimbangan sosial menjadi fokus utama, yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Etika dalam ekonomi Islam memiliki peranan krusial dalam mengatur perilaku individu di masyarakat. Sebagai contoh, dalam setiap transaksi ekonomi, seorang muslim dilarang untuk berbuat curang, menipu, atau mengeksploitasi pihak lain. Setiap transaksi seharusnya dilaksanakan dengan integritas, keadilan, dan keterbukaan. Dalam aspek produksi dan konsumsi, seorang muslim juga diwajibkan untuk menjauhi barang-barang yang diharamkan atau yang dapat merugikan orang lain. Sistem ekonomi Islam turut mendukung praktik-praktik yang memperkuat kesejahteraan sosial, seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang kurang beruntung. (Nafsi, 2025)

Sejarah Perkembangan Ekonomi Sosialis

Sejarah dan gagasan pemikiran ekonomi sosialisme berpangkal pada dinamika sosial-ekonomi yang bergolak antara akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Sistem ini muncul sebagai wujud reaksi tajam dan perlawanan terhadap dampak besar Revolusi Industri. Meskipun revolusi itu menghasilkan lonjakan teknologi dan kemakmuran finansial yang berlimpah bagi para pemilik modal serta pemilik pabrik, kaum buruh justru terjebak dalam kemiskinan ekstrem, jam kerja yang mengeksploitasi, dan kondisi hidup yang tidak layak. Ketimpangan sosial yang mencolok ini memicu munculnya pemikiran-pemikiran kritis yang mempertanyakan keabsahan kapitalisme dan mendorong terbentuknya gagasan ekonomi baru yang berorientasi pada keadilan sosial.

Tokoh yang kerap dicatat sebagai pemikir pertama dengan julukan sosialis adalah François Noël Babeuf pada masa Revolusi Prancis. Babeuf menjadi pelopor yang menyuarakan doktrin pertarungan kelas antara para pemilik modal yang menguasai sumber daya dan kaum buruh yang hanya mengandalkan tenaga kerja

mereka. Gagasan awal ini menjadi fondasi penting yang kemudian dikembangkan secara jauh lebih radikal, menyeluruh, dan sistematis oleh Karl Marx melalui aliran Marxisme. Pemikiran-pemikiran tersebut secara konsisten menuntut pembongkaran struktur ekonomi lama demi mewujudkan masyarakat tanpa kelas.

Pada dasarnya, pemikiran ekonomi sosialisme bercita-cita menciptakan kemakmuran masyarakat secara merata serta menghapuskan segala bentuk penindasan dan eksploitasi ekonomi. Untuk mencapai tujuan ideal itu, sistem ini bergantung pada peran negara yang sangat dominan. Negara berperan sebagai pengatur utama yang mengomandoi seluruh roda ekonomi secara terpusat. Dalam pandangan Marxisme, penguasaan negara atas seluruh sektor ekonomi—mulai dari proses produksi, pola konsumsi, hingga jaringan distribusi menjadi syarat mutlak agar keadilan bagi kaum buruh benar-benar terwujud sehingga mereka dapat menikmati hasil kerja kerasnya secara utuh tanpa diperas oleh kepentingan pemilik modal.

Peran aktif negara ini juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya monopoli pasar oleh para kapitalis yang dianggap serakah dan bertindak hanya demi akumulasi keuntungan pribadi. Pemerintah mengawasi mekanisme pasar secara ketat agar tidak ada celah bagi pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang. Dalam praktik yang berkembang, sosialisme juga terwujud melalui penguasaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah atas sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti penyediaan air, listrik, dan telekomunikasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan barang serta jasa publik yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, meskipun pada saat yang sama mekanisme penawaran dan permintaan dalam skala tertentu masih dibiarkan berjalan. (Demeter et al., 2015)

Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada aturan hukum syariah. Aspek ekonomi Islam mulai tampak ketika Nabi Muhammad SAW terlibat dalam aktivitas perdagangan pada usia 12 hingga 17 tahun. Selain faktor itu, lingkungan perdagangan di sekitar Muhammad SAW menumbuhkan ketertarikannya untuk ikut serta dalam sektor perdagangan. Beliau mengawali karier di bidang ini pada usia dua belas tahun dengan melakukan perjalanan ke Syam bersama rombongan dagang pamannya, Abu Thalib. Ketika memasuki usia dua puluhan, Nabi

memilih untuk berdagang bersama Khadijah. Saat bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid, perempuan kaya yang kemudian menjadi istrinya, usaha dagangnya berkembang secara signifikan. Kehidupan Nabi Muhammad dan komunitas Muslim saat itu menjadi teladan yang luar biasa dalam menerapkan nilai-nilai Islam, terutama pada aspek ekonomi.

Kegiatan perdagangan Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Dalam menjalankan perdagangan, beliau dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat di sekitarnya. Sikap itu menjadi salah satu landasan penting dalam penerapan ekonomi Islam, sebab kegiatan ekonomi bukan hanya soal bagaimana seseorang mendapat keuntungan, melainkan juga bagaimana keuntungan itu diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai ketentuan syariah. Karena itu, aktivitas perdagangan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi salah satu contoh bagaimana kegiatan ekonomi dapat berjalan sambil tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan agama. Perjalanan Nabi Muhammad SAW di dunia perdagangan juga memperlihatkan bahwa Islam tidak melarang umatnya menjalankan kegiatan ekonomi dan meraih keuntungan. Sebaliknya, Islam memberi pedoman tentang bagaimana kegiatan ekonomi tersebut seharusnya dijalankan. Setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Dalam kegiatan perdagangan, seorang pedagang wajib memberikan informasi yang benar tentang barang yang diperjualbelikan, tidak melakukan penipuan, tidak mengurangi timbangan, serta tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Prinsip-prinsip itu kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem ekonomi Islam.

Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, kegiatan ekonomi juga tidak hanya terbatas pada perdagangan secara individu, tetapi tumbuh dalam kehidupan masyarakat Muslim secara keseluruhan. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, nilai-nilai Islam mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan hubungan sosial. Masyarakat diarahkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kekayaan tidak dipandang semata-mata sebagai sesuatu untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial. Hal ini bisa terlihat dari kewajiban menunaikan

zakat serta anjuran untuk bersedekah dan menolong masyarakat yang membutuhkan. Tujuan ekonomi Islam adalah mewujudkan kehidupan ekonomi yang seimbang dan adil. Dalam sistem ini, kepemilikan harta tetap diakui, namun pemanfaatannya harus mengikuti aturan dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam syariah. Seseorang berhak memperoleh dan mengembangkan kekayaan dengan cara yang halal, tetapi sekaligus juga berkewajiban memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan begitu, ekonomi Islam tidak hanya mengkaji kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga membahas nilai moral serta tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, Islam juga memperhatikan larangan terhadap praktik ekonomi yang bisa menimbulkan ketidakadilan. Sejumlah praktik seperti riba, penipuan, perjudian, dan transaksi yang mengandung ketidakjelasan dilarang sebab dapat menimbulkan kerugian serta ketimpangan di masyarakat. Larangan itu memperlihatkan bahwa ekonomi Islam berupaya mewujudkan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi diharapkan mendapatkan haknya secara wajar dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi juga tampak dari cara beliau menjalin hubungan dengan para mitra dagang dan masyarakat. Kejujuran dan amanah merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan pada kegiatan perdagangan. Kepercayaan itu berperan besar bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi karena hubungan antara pedagang dan pembeli tidak hanya bertumpu pada keuntungan, tetapi juga pada rasa saling percaya. Prinsip tersebut masih relevan diterapkan dalam kehidupan ekonomi masa kini, terlebih ketika kegiatan perdagangan semakin berkembang dan melibatkan hubungan antar berbagai pihak.

Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Muslim pada masa awal Islam. Pengalaman beliau dalam berdagang memberikan gambaran tentang bagaimana kegiatan ekonomi dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama merupakan nilai penting yang menjadi dasar kegiatan ekonomi dalam Islam. Nilai-nilai itu kemudian menjadi landasan dalam perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam sampai sekarang. Kehidupan Nabi Muhammad dan komunitas Muslim ketika itu menjadi teladan yang

luar biasa dalam menerapkan nilai-nilai Islam, terutama pada aspek ekonomi. Melalui kegiatan perdagangan, pengelolaan harta, zakat, sedekah, serta hubungan ekonomi dengan masyarakat, terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan terciptanya kehidupan ekonomi yang adil dan seimbang. Oleh sebab itu, ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem perekonomian yang mengatur cara seseorang memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sistem yang mengarahkan manusia untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan ketentuan syariah, kepentingan masyarakat, dan nilai-nilai kemanusiaan. (Manalu et al., n.d.)

Dampak era keemasan Abbasiyah terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan tidak hanya terletak pada penemuan ilmu baru, tetapi juga pada cara ilmu tersebut disebarluaskan ke seluruh dunia Islam dan bahkan di luar batas tersebut. Warisan intelektual ini memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan masyarakat Islam dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kemajuan dalam pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pada akhirnya, evolusi sistem ekonomi Islam selama Dinasti Abbasiyah menunjukkan puncak kejayaan dalam sejarah ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti zakat, pelarangan riba, dan redistribusi kekayaan tetap menjadi fondasi utama dalam kerangka ekonomi. Pertanian, perdagangan, sumber daya alam, sektor keuangan, kemajuan teknologi, serta warisan ilmu memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa Abbasiyah. Warisan ilmu dan budaya yang diciptakan juga menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi Islam di masa mendatang dan memberikan kontribusi besar terhadap sejarah ekonomi dunia yang berkaitan dengan peradaban Islam. (Desi Andriani, 2023).

Karakteristik Ekonomi Sosialis

Ciri-ciri ekonomi sosialis bisa dilihat dari peran negara dalam mengelola kegiatan ekonomi serta mengutamakan kepentingan masyarakat secara bersama. Pada sistem ekonomi ini, kegiatan lebih diarahkan untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan individu. Ekonomi sosialis mempunyai ciri berupa kepemilikan sumber daya dan alat produksi penting yang sebagian besar dikuasai oleh negara. Upaya ini dilakukan supaya sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Negara berperan mengatur pemanfaatan sumber daya, kegiatan produksi, serta menetapkan

kebijakan ekonomi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat. Karena negara menguasai sumber daya penting, pemerintah lebih mudah mengatur kegiatan ekonomi dan mengarahkannya pada tujuan bersama.

Kepemilikan pribadi pada sistem ekonomi sosialis dibatasi supaya penguasaan ekonomi oleh kelompok tertentu tidak terjadi. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menekan penumpukan kekayaan dan kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Di samping itu, kesamaan ekonomi merupakan salah satu hal yang diutamakan dalam sistem ekonomi sosialis. Sistem ini berupaya mewujudkan pemerataan agar masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerataan itu dapat diwujudkan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan umum lainnya. Karena itu, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan yang diraih, tetapi juga dari bagaimana hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara bersama dan tidak hanya dinikmati oleh sebagian orang. Pemerintah pun memegang peran besar dalam mengatur tata kelola ekonomi. Pengaturan itu meliputi kegiatan produksi dan distribusi agar sejalan dengan tujuan sosialisme. Pemerintah dapat menetapkan barang dan jasa yang perlu diproduksi serta mengatur pendistribusiannya supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar sebab pemerintah turut menentukan arah dan jalannya kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu besar dan tidak terjadi penguasaan sumber daya secara berlebihan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, sistem ekonomi sosialis lebih mengutamakan kepentingan bersama, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dibandingkan kepentingan individu. (Sagaf et al., 2024)

Karakteristik Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan nilai-nilai agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, ekonomi Islam menekankan pembagian kekayaan secara fair, menghindari cara-cara yang merugikan seperti riba dan penindasan, serta mendorong keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini menjadikan manusia sebagai pengelola bumi dengan tugas untuk mengurus sumber daya secara cerdas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Empat ciri utama ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah Iqtishad Rabbani yang berarti ekonomi bersifat ketuhanan, Iqtishad Akhlaqi yang berarti ekonomi bersifat bercorak akhlak, Iqtishad Insani yang berarti ekonomi bersifat rakyat, dan Iqtishad Washathi yang berarti ekonomi bersifat pertengahan. Keempat ciri tersebut memberikan dasar yang jelas untuk praktik ekonomi yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara hal dunia dan hal akhirat. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa berbisnis tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai cara beribadah yang harus dilakukan dengan niat tulus dan berlandaskan budi pekerti. (Nafsi, 2025)

Menurut Ahmad Z Dwiatmaja, dan rekan-rekan (2024) salah satu aspek pertama dari ekonomi Islam adalah keterkaitannya dengan keyakinan, hukum, serta nilai-nilai moral. Ekonomi Islam memiliki hubungan yang mendalam dengan ajaran Islam, yang menunjukkan bahwa seluruh ciptaan di alam ini ditujukan untuk memenuhi keperluan manusia. Aktivitas ekonomi dalam Islam dapat dianggap sebagai bentuk ibadah jika mengintegrasikan keyakinan serta ketentuan syariah. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan etika dalam penerapan ekonomi Islam menunjukkan keterkaitan antara ekonomi dan norma moral (Jamaludin dan Syafrizal, 2020). Selanjutnya, zakat dianggap sebagai aspek unik dalam ekonomi Islam yang tidak terdapat dalam sistem perekonomian lainnya (Dwiatmaja dan Majid, 2024).

Ekonomi Islam memiliki pandangan unik tentang harta, di mana seluruh kekayaan di bumi merupakan kepunyaan Allah SWT yang dipercayakan kepada kita, dan segala harta yang kita miliki seharusnya diperoleh melalui jalan yang halal, demi mencapai Falah (kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat). Dalam kerangka Islam, bagi yang ingin memiliki aset atau usaha, haruslah berusaha dengan gigih untuk meraih yang dikenal sebagai Islamic Legal Maxim, yaitu mengejar keuntungan sebanyak mungkin sesuai dengan pedoman prinsip-prinsip syariah. Salah satu hal yang sangat krusial dalam transaksi ekonomi islam adalah ketiadaan unsur Riba (tambahan), *Maisir* (judi), dan *Gharar* (ketidakpastian). (Daenuri, n.d.)

Perbedaan Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam.

Tabel 1. Perbedaan Ekonomi Sosialis dan Ekonomi Islam

Aspek	Ekonomi Sosialis	Ekonomi Islam
Kebebasan	Semua kategori produksi diadministrasikan dan dimiliki oleh pemerintah. Semua manfaat yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Irkhami, 2015)	Islam memberikan hak kepada individu untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dilengkapi dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh hukum syariat. (Irkhami, 2015)
Jaminan sosial	Setiap individu memperoleh kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan keperluan pribadi mereka. Di samping itu, setiap orang yang berstatus warga negara juga mendapatkan kebutuhan dasar mereka. (Haris, 2024)	Setiap individu berhak untuk tinggal di negara yang menganut prinsip Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan dasar mereka. Tanggung jawab negara Islam adalah untuk memastikan setiap warga dapat mencukupi kebutuhannya sesuai dengan prinsip hak hidup. (Haris, 2024)
Distribusi kekayaan	Setiap bentuk produksi dan sumber pendapatan tergantung pada bangsa atau komunitas secara keseluruhan. (Kholiq Budi Santoso, 2023)	Sistem Islam menghindari penumpukan harta hanya pada segelintir orang, ia berfungsi untuk menyebarkan kekayaan ke berbagai lapisan ekonomi masyarakat. (Kholiq Budi

		Santoso, 2023)
Hak Kepemilikan Harta	Harta dan alat produksi sepenuhnya milik negara, sehingga individu tidak diperbolehkan memilikinya secara perorangan. (Irkhami, 2015)	Setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, memiliki, dan menikmati hasil usaha, tetapi hal tersebut harus disertai dengan nilai moral dan syariat. (Irkhami, 2015)
Prinsip pemerataan dan keseimbangan ekonomi	Seluruh kekayaan serta sumber pendapatan tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan dipusatkan sepenuhnya pada pemerintah atau masyarakat secara keseluruhan. (Haris, 2024)	Pemerataan kekayaan dijaga melalui kewajiban bagi orang kaya untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan melalui instrumen zakat. (Haris, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah kami uraikan, sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam memiliki kesamaan dalam menjadikan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan ekonomi sebagai tujuan utama, namun keduanya berpijak pada landasan pemikiran yang berbeda dalam mengatur kegiatan ekonomi. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa kedua sistem tidak hanya berfokus pada keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, serta pemerataan hasil ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara memegang peran yang kuat dalam mengelola sumber daya dan kegiatan ekonomi demi tercapainya pemerataan serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi Islam berpijak pada Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip syariah dengan mengakui kepemilikan individu maupun publik serta mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan

nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, perbedaan konsep antara kedua sistem terutama terletak pada dasar yang dipakai untuk menentukan kepemilikan, mekanisme pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Dari segi sejarah, sosialisme tumbuh sebagai respons terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi yang muncul pada masa perubahan ekonomi akibat Revolusi Industri, lalu berkembang melalui berbagai pemikiran yang menekankan kesetaraan dan kepentingan masyarakat. Ketimpangan pada masa Revolusi Industri mendorong lahirnya pemikiran yang mengkritik dominasi pemilik modal dan menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja serta kelompok masyarakat yang lemah secara ekonomi. Ekonomi Islam tumbuh sejak masa Rasulullah SAW melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan perdagangan dan kehidupan ekonomi, lalu mengalami perkembangan pemikiran hingga diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi pada masa modern. Nilai-nilai seperti kejujuran dalam jual beli, larangan riba, kewajiban zakat, serta tanggung jawab sosial menjadi landasan terbentuknya sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Karakteristik kedua sistem memperlihatkan adanya perbedaan dalam hal kepemilikan, peran negara, mekanisme ekonomi, keuntungan, distribusi kekayaan, dan tujuan ekonomi. Sistem sosialis lebih menekankan pengaturan dan perencanaan oleh pemerintah, sementara ekonomi Islam memberi ruang bagi kepemilikan dan mekanisme pasar dengan batasan yang ditetapkan oleh prinsip syariah. Dalam sistem sosialis, negara berperan besar dalam mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya agar kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat terwujud. Sebaliknya, ekonomi Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan menjalankan kegiatan usaha, namun kebebasan itu tetap dibatasi oleh nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba dan kezaliman.

Kajian ini memperjelas posisi sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam melalui perbandingan konsep, perkembangan sejarah, karakteristik, serta mekanisme keduanya, sehingga dapat menjadi dasar pemahaman dalam meninjau berbagai pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap sistem

ekonomi memiliki cara berbeda dalam menjawab persoalan ketimpangan, kepemilikan, dan pemerataan. Sistem sosialis menekankan peran negara sebagai pengatur utama kegiatan ekonomi, sedangkan ekonomi Islam menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan kewajiban sosial yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem menjadi penting agar kegiatan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perbedaan kedua sistem penting untuk melihat bagaimana prinsip ekonomi diterapkan sesuai dengan landasan masing-masing. Karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan berfokus pada kajian konseptual serta historis, penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan melalui penelitian empiris atau studi kasus untuk mengkaji penerapan sistem ekonomi sosialis dan ekonomi Islam dalam praktik serta dampaknya terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian berikutnya dapat mengkaji penerapan kebijakan ekonomi, praktik keuangan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, maupun kebijakan pemerintah dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang tidak sekadar mengulas teori, tetapi juga meninjau penerapan nyata kedua sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M., 2026. Rekonstruksi Manajemen Bisnis Syariah Melalui Pendekatan Paradigma Pendidikan Islam. *GJMBI* 3, 38–54.
<https://doi.org/10.61111/great.v3i1.1310>
- Akbar, M.A., Winarsa, H., 2024. ANALISIS DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Ar Rasyiid* 2, 75–84.
<https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i2.21>
- Desi Andriani, K.A., 2023. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10066904>
- Dwiatmaja, A.Z., Majid, J., 2024. KONSEP DASAR DAN KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM.
- Fathurrahman, A., 2018. Fondasi Etis Ekonomi Pada Masa Rasulullah (Sebuah Kajian Historis-Normatif). *Jur. Ekon. Syar* 3.
<https://doi.org/10.30736/jesa.v3i2.42>
- Haris, M., 2024. Peran Ekonomi Islam dalam Mengatasi Krisis Global: Studi Kasus Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *comserva* 3, 4517–4525.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1244>

- Irkhami, N., 2015. Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi). *muqtasid* 6, 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87>
- Jamaludin, J., Syafrizal, R., 2020. Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *mua* 12, 38. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>
- Juliyanto, M.S., n.d. SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI NEO-KLASIK, KAPITALISME, SOSIALISME, DAN KEYNESIAN.
- Kholiq Budi Santoso, 2023. PERILAKU EKONOMI ISLAM DAN KEMAKMURAN. *dinar* 7, 102–146. <https://doi.org/10.61088/dinar.v7i1.645>
- Manalu, P.A., Hisan, S.K., Fitria, N.T., Zein, A.W., n.d. Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern.
- Nafsi, B.I., 2025. Karakteristik ekonomi islam dalam al-quran: Systematic literature review.
- Nopnop, N.I.Zu., Usman, 2025. METODOLOGI ILMIAH SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM KONTEKSTUAL: PERSPEKTIF FILSAFAT C.A. VAN PEURSEN. *Thullab J Mhs Studi Islam* 7, 372–384. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss2.art11>
- Riyadi, S., Hilyatin, D.L., 2021. TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, 43. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100>
- Saeed Fayzul Hayat, Idris Parakkasi, Muslimin Kara, Fatimah, 2026. PERAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM: TELAAH KOMPARATIF ANTARA KAPITALISME DAN SOSIALISME. *AK* 6, 139–156. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v6i1.11902>
- Sagaf, U., Ibrahim, I., Rafiuddin, R., 2024. ANALISIS PERBANDINGAN SISTIM EKONOMI ISLAM DAN SISTIM EKONOMI KAPITALIS. *Jesa j. ekon. syariah* 7, 83–92. <https://doi.org/10.52266/jesa.v7i1.3240>